

MANAJEMEN STRATEGIK PENDIDIKAN INKLUSIF SEKOLAH MENENGAH ATAS

M. Ary Irawan¹, M. Rasyid Ridlo², Ahmad Muslim³

Universitas Pendidikan Mandalika Mataram^{1,2,3}

m.ary_irawan@undikma.ac.id¹, m.rasyidridlo@undikma.ac.id², ahmad
muslim82@ikipmataram.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategik pendidikan inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Metode penelitian adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam melalui tiga aktivitas, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing* atau *verification*. Hasil penelitian menunjukkan, 1) perencanaan Strategik, yaitu pertama, analisis kesiapan stakeholder sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Kedua, pembentukan pusat sumber pendidikan inklusif. Ketiga, kesiapan sarana dan prasarana; 2) pelaksanaan Strategik, yaitu Pertama, Menetapkan input sumber daya manusia (pendidik, tenaga kependidikan, & siswa). Kedua, menerapkan kurikulum modifikasi; (3) evaluasi Strategik Pendidikan Inklusif meliputi aspeknya yaitu masukan (*input*), proses (*process*), dan keluaran (*output*) yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Simpulan, secara umum manajemen strategik pendidikan inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjalan secara berkelanjutan tampak dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategik yang dilakukan.

Kata kunci: Manajemen Strategik, Pendidikan Inklusif

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the planning, implementation, and strategic evaluation of high school inclusive education in Mataram City, West Nusa Tenggara (NTB) Province. The research method is qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Analysis of the internal data through three activities, namely data reduction, data display, and conclusion drawing or verification. The results of the study show, 1) Strategic planning, namely first, an analysis of the readiness of school stakeholders as providers of inclusive education. Second, the establishment of an inclusive education resource center. Third, the readiness of facilities and infrastructure; 2) Strategic implementation, namely First, Determine the input of human resources (educators, education staff, & students). Second, implementing a modified curriculum; (3) the strategic evaluation of inclusive education includes its aspects, namely input, process, and output which is carried out regularly and continuously. In conclusion, in general, the strategic management of high school inclusive education in Mataram City, West Nusa Tenggara (NTB) Province runs sustainably, as can be seen from the strategic planning, implementation, and evaluation carried out.

Keywords: Strategic Management, Inclusive Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu proses usaha sadar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, keyakinan dan kebiasaan. Bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi dan bakat istimewa. Pendidikan khusus dapat dilaksanakan melalui lembaga pendidikan khusus (SLB) atau inklusif (terintegrasi ke dalam lembaga pendidikan regular). Pemerintah terus-menerus berupaya menyediakan satuan pendidikan dalam upaya memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat memperoleh layanan pendidikan yang sama dengan siswa regular melalui pendidikan inklusif.

Salah satu dasar penekanan pendidikan inklusif berdasarkan pada *World Report on Disability* (WHO, 2011). Upaya untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas awalnya difokuskan pada sekolah khusus (SLB), dalam beberapa kasus menargetkan disabilitas tertentu. Lembaga-lembaga tersebut cenderung hanya melayani sebagian kecil dari mereka yang membutuhkan dan ternyata tidak efektif dari segi biaya. Sebagian pelayanan hanya diperoleh bagi mereka yang berada di daerah perkotaan, sehingga banyak siswa yang tidak memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dan diasingkan dari keluarga dan komunitasnya.

Lahirnya Permendikbud No. 70 Tahun 2009 menjadi penguat pelaksanaan pendidikan inklusif, dimana tertuang pada Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa “*inclusive education is the process of responding to the diversity of children through enhancing participation in classrooms and reducing exclusion from education*” (UNESCO, 2007). Pendidikan inklusif merupakan proses menanggapi keragaman anak melalui peningkatan partisipasi di ruang kelas dan mengurangi eksklusi atau pengecualian dari pendidikan.

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan Riskesdas 2018, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI, Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam kategori “tinggi” persentase penduduk umur 10 tahun ke atas yang mengalami disabilitas di Indonesia yaitu sebesar yaitu 9,40% dan proporsi disabilitas anak 5-17 tahun yaitu sebesar 2,7% (Pusat Data, dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, 2019). Umur tersebut merupakan usia sekolah bagi anak-anak dan seharusnya merupakan salah satu prioritas bagi pemerintah daerah untuk berkomitmen menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sebagaimana amanat Permendikbud No. 70 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan, dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah

untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Selanjutnya dipertegas dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Problematika pendidikan inklusif berdasarkan hasil penelitian terdahulu antara lain, a) kemampuan guru yang terbatas (Khan et al., 2017); b) fasilitas yang belum memadai (Hornby, 2011); c) belum optimalnya pengembangan kurikulum pendidikan inklusif serta kurangnya komitmen stakeholder dalam menunjang pendidikan inklusif (Budiarti & Sugito, 2018). Berdasarkan permasalahan tersebut menarik untuk dilakukan kajian manajemen strategik pendidikan inklusif SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), adapun sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Mataram yaitu SMAN 1 Mataram, SMAN 5 Mataram, dan SMAN 6 Mataram Provinsi NTB.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam upaya mendeskripsikan fenomena dan memperoleh data yang akurat dalam kaitannya untuk mengungkap manajemen strategik pendidikan inklusif SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 6 Mataram, karena sekolah tersebut memiliki pusat sumber pendidikan inklusif. Peneliti melakukan observasi (pengamatan), dokumentasi, dan wawancara. Metode analisis data kualitatif melalui tiga aktivitas yaitu, 1) reduksi data (*data reduction*); 2) penyajian data (*data display*); 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

HASIL PENELITIAN

Dalam hasil penelitian ini disajikan data yang ditemukan di lapangan sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dikaji yaitu manajemen strategik pendidikan inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Data hasil penelitian mencakup perencanaan strategik, pelaksanaan strategik, dan evaluasi strategik pendidikan inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun pembahasan dalam penelitian ini melalui analisis hasil penelitian dengan teori yang ada.

Perencanaan Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Perencanaan strategik pendidikan inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi: *Pertama*, analisis kesiapan stakeholder sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite sekolah, dinas pendidikan) sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Analisis penting dilakukan oleh sekolah sebagai upaya mendiagnosa kesiapan dan komitmen stakeholder sekolah dalam membantu terselenggaranya pendidikan inklusif. Keputusan dengan

melibatkan *stakeholder* yang dilakukan di sekolah memperkuat komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif, dikarenakan melahirkan keputusan terbaik,

Kedua, pembentukan pusat sumber pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ditemukan bahwa pembangunan pusat sumber pendidikan inklusif menggunakan dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2020. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 16 ayat 1 Pemerintah daerah dapat membentuk Pusat Sumber Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif guna memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Pusat Sumber Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif mempunyai tugas, (a) memberikan dukungan profesional terhadap sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; (b) menyediakan layanan informasi dan konsultasi; (c) menyediakan layanan identifikasi dan asesmen; (d) melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan pendidikan inklusif; (e) merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Sekolah mengeluarkan kebijakan dengan keputusan Nomor: 423.5/121.a/SMAN06.Mtr/VII2020 tentang Pengelola Inklusi dan Daftar Guru Mata Pelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus di SMA Iklusif Mataram Tahun Pelajaran 2020/2021. Adapun data pengelola inklusi di SMAN 6 Mataram terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota yang terdiri dari 5 orang.

Pentingnya pembentukan pengelola pendidikan inklusif oleh kepala sekolah dengan memilih guru yang kompeten sebagai salah satu upaya memperlancar proses belajar mengajar dan kegiatan pendukung pendidikan inklusif.

Ketiga, kesiapan sarana dan prasarana pendidikan inklusif di sekolah. SMAN 6 Mataram menyiapkan sarana dan prasarana khusus bagi anak berkebutuhan khusus (AKB) diantaranya: ruang pengelola pendidikan inklusi, buku braille, al-qura'an braille, alat musik, alat peraga, dan alat olahraga. Selanjutnya di lingkungan sekolah khusus ABK menyediakan: jalan yang timbul mulai dari depan gerbang dan sekitar halaman sekolah, dan ralling.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif di sekolah yang ramah terhadap ABK sangat menunjang proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, dimana siswa difabel lebih merasa nyaman dalam setiap aktivitas pembelajaran di sekolah.

Pelaksanaan Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pelaksanaan strategik (*strategy implementaion*) SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui, *Pertama*, Menetapkan *input* sumber daya manusia (pendidik, tenaga kependidikan, & siswa). Melalui kebijakan kepala sekolah tentang Pengelola Inklusi dan Daftar Guru Mata Pelajaran Siswa Berkebutuhan Khusus di SMA Iklusif Mataram, mengindikasikan sekolah telah membuat kebijakan terkait koordinasi dan pembagian tugas pengelola pendidikan inklusif dan guru mata pelajaran siswa anak berkebutuhan khusus (ABK).

SMAN 6 Mataram sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Namun, strategi sekolah menyiapkan guru inklusif yang juga merupakan guru matpel (mata pelajaran) melalui *workshop* atau pelatihan selama 1 (satu) tahun bagi guru sebagai penunjang kompetensi untuk berinteraksi dengan para murid anak berkebutuhan khusus (ABK). Para guru inklusif sebaiknya secara kontinyu diberikan pelatihan berkelanjutan sebagai upaya *upgrade* kompetensi sehingga para guru semakin profesional. Efektifitas pelatihan ditinjau dari keluaran diklat. Peserta diklat mengalami perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh selama diklat, dan diharapkan mampu mengaplikasikannya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam sekolah. *Input* peserta didik di SMAN 6 Mataram, berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dalam penerimaan peserta didik baru sekolah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan asesmen bagi peserta didik baru yang tergolong disabilitas. Asesmen dilakukan sebagai dasar pertimbangan sekolah dalam menentukan jenis layanan pendidikan yang tepat sasaran agar sesuai dengan kebutuhan, dan perkembangan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di SMAN 6 Mataram terdiri dari berbagai jenis disabilitas, diantaranya adalah tunagrahita, tunanetra, dan autis.

Kedua, menerapkan kurikulum modifikasi. SMAN 6 Mataram dalam pelaksanaan pendidikan inklusif menerapkan kurikulum reguler yang dimodifikasi (penyelarasan) sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut sesuai amanat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa “selain kurikulum reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi (penyelarasan) sesuai dengan kebutuhan peserta didik”. Kurikulum disusun bersama, diantaranya adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum, pengelola pendidikan inklusif, dan guru. Kurikulum modifikasi disesuaikan kebutuhan ABK, sehingga terdapat bagian yang tidak sama dengan peserta didik reguler.

Evaluasi Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Evaluasi merupakan sebuah proses penilaian yang sistematis untuk menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan, dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Evaluasi Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dilakukan meliputi aspek, (a) masukan (*input*), meliputi guru, peserta didik, sarana prasarana, dan kurikulum; (b) proses (*process*), meliputi pelaksanaan pembelajaran; (c) keluaran (*output*) yaitu meliputi lulusan.

Model evaluasi yang dilakukan pihak sekolah, diantaranya aspek *input*, khususnya guru dilakukan melalui kegiatan monitoring oleh pengelola pendidikan inklusif dan supervisi oleh kepala sekolah, asesmen bagi peserta didik baru yang tergolong disabilitas, sarana prasarana melalui inventaris yaitu pencatatan sarana

prasarana yang dimiliki sekolah, dan evaluasi kurikulum dilakukan dengan model *action research* oleh tim pengembang kurikulum sekolah dengan melibatkan guru, siswa, orang tua, dan pihak eksternal. Aspek *process*, evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan dengan menerapkan standar nilai yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi peserta didik. Adapun prosedur penilaian meliputi penilaian tertulis, sikap, proyek, produk, portofolio, dan unjuk kerja. Aspek keluaran (*output*) meliputi lulusan. SMAN 6 Mataram melakukan evaluasi terhadap lulusan melalui *tracer study*, berdasarkan dokumen data alumni siswa inklusi yang melanjutkan ke perguruan tinggi, dan bekerja tahun 2021 menginformasikan bahwa sebagian besar alumni tersebar di beberapa perguruan tinggi swasta dan negeri, dan bekerja sebagai guru, tele marketing, dan musisi.

PEMBAHASAN

Perencanaan Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Perencanaan strategik pendidikan inklusif mengacu pada perumusan strategi, oleh karenanya peran kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk menghasilkan rencana yang tepat. David (2011), menyatakan bahwa “*a strategic plan results from tough managerial choices among numerous good alternatives*” (rencana strategis dihasilkan dari pilihan manajerial yang sulit di antara banyak alternatif yang baik).

Perencanaan strategik pendidikan inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi: *Pertama*, analisis kesiapan stakeholder sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite sekolah, dinas pendidikan) sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Pentingnya analisis menurut Loeb et al., (2017) menyatakan bahwa “*descriptive analysis can also be used to diagnose issues that warrant the immediate attention of policymakers, practitioners, and researchers*” (analisis digunakan untuk mendiagnosis masalah yang memerlukan perhatian segera dari pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti). Adapun perlibatan *stakeholder* menurut Hitt et al., (2007) adalah *stakeholders are the individuals and groups who can affect, and are affected by, the strategic outcomes achieved and who have enforceable claims on a firm's performance* (pemangku kepentingan merupakan individu dan kelompok yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi tujuan strategis yang dicapai dan memiliki hak yang dapat ditegakkan atas kinerja organisasi).

Keputusan dengan melibatkan *stakeholder* yang dilakukan di sekolah memperkuat komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif, dikarenakan melahirkan keputusan terbaik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pearce & Robinson (2009), menyatakan bahwa keputusan strategis berbasis kelompok kemungkinan besar akan diambil dari alternatif terbaik yang tersedia.

Kedua, pembentukan pusat sumber pendidikan inklusif. Pentingnya pembentukan pengelola pendidikan inklusif oleh kepala sekolah dengan memilih guru yang kompeten sebagai salah satu upaya memperlancar proses belajar mengajar dan kegiatan pendukung pendidikan inklusif. Siagian (2005) menyatakan bahwa manajemen

berhasil menjadikan organisasi berkinerja tinggi selalu berupaya agar dalam organisasi tersedia tenaga-tenaga berpengetahuan, dan keterampilan tinggi disertai semangat kewirausahaan. Penetapan struktur pengelola pendidikan inklusif adalah hal utama dalam mengorganisasi berbagai aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia dalam sebuah organisasi besar agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik (Hunger & Wheelen, 2003).

Ketiga, kesiapan sarana dan prasarana pendidikan inklusif di sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif di sekolah yang ramah terhadap ABK sangat menunjang proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, dimana siswa difabel lebih merasa nyaman dalam setiap aktivitas pembelajaran di sekolah. Gusti (2021), mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk *setting* sekolah yang ramah terhadap siswa difabel. Dukungan dalam bentuk itu akan menciptakan akses bagi siswa difabel dalam beraktifitas baik diluar maupun di dalam ruangan.

Pelaksanaan Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pelaksanaan strategik (*strategy implementaion*) SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui, *Pertama*, Menetapkan *input* sumber daya manusia (pendidik, tenaga kependidikan, & siswa). Sebagaimana hasil penelitian yang ditemukan bahwa sekolah tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK), namun strategi sekolah menyiapkan guru inklusif yang juga merupakan guru matpel (mata pelajaran) melalui workshop atau pelatihan selama 1 (satu) tahun. Efektifitas pelatihan diharapkan agar para guru memiliki keterampilan, dan diharapkan mampu mengaplikasikannya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Thang and Buyens menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa “*T&D leads to superior knowledge, skills, abilities, attitudes, and behaviour of employees that eventually enhance organizational performance*” (pelatihan mengarahkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan perilaku yang unggul yang pada akhirnya meningkatkan kinerja organisasi) (Ng’ang’a, 2013).

Penetapan *input* sumber daya manusia sebagai *strategy implementaion*, menurut David (2011), bahwa “*strategy implementation requires a firm to establish annual objectives, devise policies, motivate employees, and allocate resources so that formulated strategies can be executed*” (implementasi strategi mengharuskan organisasi untuk menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dijalankan). Selanjutnya Rothaermel (2015), menyatakan bahwa “*strategy implementation concerns the organization, coordination, and integration of how work gets done*” (implementasi strategi menyangkut organisasi, koordinasi, dan integrasi tentang bagaimana pekerjaan diselesaikan).

Kedua, menerapkan kurikulum modifikasi. *National Association of Special Education Teachers* (NASSET) (2021), yang merupakan asosiasi profesional guru

pendidikan khusus di Amerika menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengadaptasi kurikulum, meliputi pengajaran gabungan, penjadwalan fleksibel, instruksi individual, pembelajaran penguasaan, instruksi kelompok besar, dan kecil, tutorial individual dan pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, perlu menyesuaikan bentuk pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu anak berkebutuhan khusus, menyesuaikan faktor penyampaian dan respons yang akan dihadapi anak di sekolah.

Perencanaan atau perumusan dan implementasi strategi yang efektif berdasarkan pada prinsip 5 (lima) Cs yaitu, a) *commands* (perintah), dikeluarkan pada waktu yang tepat; b) *control* (kontrol), baik formal maupun informal, langsung atau tidak langsung; c) *coordination* (koordinasi), berbagai bagian organisasi; d) *communication* (komunikasi), mengalir melalui saluran yang tepat; e) *conflict* (konflik), dibendung dan disalurkan secara kreatif (David, 2011).

Evaluasi Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Evaluasi Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dilakukan meliputi aspek: (a) masukan (*input*), meliputi: guru, peserta didik, sarana prasarana, dan kurikulum, (b) proses (*process*), meliputi: pelaksanaan pembelajaran dan (c) keluaran (*output*) meliputi: lulusan.

Evaluasi dilakukan secara berkala oleh tim pengelola pendidikan inklusif SMAN 6 Mataram, sebagai salah satu upaya memperoleh informasi dan dasar pertimbangan dalam membuat keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan. Nkwake (2015), menjelaskan bahwa evaluasi “*helps practitioners understand the kinds of evaluative decisions they face and enhances their ability to deliberate well*” (membantu praktisi memahami jenis keputusan evaluatif yang mereka hadapi dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berunding dengan baik). Adapun, Stake (2011) menjelaskan bahwa tujuan utama evaluasi adalah untuk menghasilkan informasi yang dapat memandu keputusan mengenai adopsi modifikasi program pendidikan.

SIMPULAN

Manajemen strategik pendidikan inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu, (a) perencanaan Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meliputi: *Pertama*, analisis kesiapan stakeholder sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite sekolah, dinas pendidikan) sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. *Kedua*, pembentukan pusat sumber pendidikan inklusif. *Ketiga*, kesiapan sarana dan prasarana pendidikan inklusif di sekolah; (b) pelaksanaan Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meliputi: *Pertama*, Menetapkan *input* sumber daya manusia (pendidik, tenaga kependidikan, & siswa). Adapun problematika di sekolah adalah tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK). *Kedua*, menerapkan kurikulum modifikasi; (c) Evaluasi

Strategik Pendidikan Inklusif SMA di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meliputi aspek: (a) masukan (*input*), meliputi: guru, peserta didik, sarana prasarana, dan kurikulum, (b) proses (*process*), meliputi: pelaksanaan pembelajaran dan (c) keluaran (*output*) meliputi: lulusan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti, N. D., & Sugito, S. (2018). Potret Pendidikan Inklusif SD Muhammadiyah Sumberejo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(2), 455-482. <http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v13i2.2968>
- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*. USA: Pearson Education, Inc
- Gubernur NTB. (2016). Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/BD%20Pergub%20inklusif.pdf
- Gusti, N. S. (2021). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Setting Sekolah Menengah Atas di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan*, 7(3), 532-544. 10.33394/jk.v7i3.3469
- Hitt, M. A., Ireland R. D., & Hoskisson R. E. (2007). *Strategic Management*. USA: Thomson Higher Education
- Hornby, G. (2011). *Parental Involvement in Childhood Education*. London: Springer
- Hunger, D. & Wheelen, T. L. (2003). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi
- Khan, I. K., Hashmi, S. H., & Khanum, N. (2017). Inclusive Education in Government Primary Schools: Teacher Perceptions. *Journal of Education and Educational Development*, 4(1), 32-47. <http://journals.iobmresearch.com/index.php/JEED/index>
- Loeb, S., Dynarski, S., McFarland, D., Morris, P., Reardon, S., & Reber, S. (2017). *Descriptive Analysis in Education: A Guide For Researchers*. (NCEE 2017-4023). Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance
- Mendiknas. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2009_Nomor070.pdf
- National Association of Special Education Teachers (NASSET). (2021). *Adapting Curriculum for Students with Special Needs Series*. USA: NASSET
- Ng'ang'a, R. (2013). The Relationship between Training and Development on Performance of State Owned Corporations. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(9), 57-75. <https://hrmars.com/index.php/IJARBSS/article/view/190/The-Relationship-between-Training-and-Development-on-Performance-of-State-Owned-Corporations>
- Nkwake, A. M. (2015). *Credibility, Validity, and Assumptions in Program Evaluation Methodology*. Switzerland: Springer International Publishing
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2009). *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat

- Presiden, RI. (2003). Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Pusdatin Kemenkes. (2019). *Pusat Data, dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, 2019*.
<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-tunarungu-2019.pdf>
- Siagian P. S. (2005). *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung
- Stake, R. E. (2011). Program Evaluation Particularly Responsive Evaluation. *Journal Of Multi Disciplinary Evaluation*, 7(15), 180-201.
https://journals.sfu.ca/jmde/index.php/jmde_1/article/view/303.
- UNESCO. (2007). *Policy Guidelines on Inclusion in Education*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000177849>
- WHO. (2011). *World Report on Disability 2011*. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/44575>